



---

## Dinamika Perdagangan Gelap Narkoba dalam Pembentukan Kerjasama Kepolisian di Asia Tenggara (1976-1981)

Tito Tri Nugroho<sup>1\*</sup>, Linda Sunarti<sup>2</sup>, Abdurakhman<sup>3</sup>

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [titotrinugroho@gmail.com](mailto:titotrinugroho@gmail.com)

\*Correspondence

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika perdagangan gelap narkoba dan dampaknya terhadap pembentukan kerjasama kepolisian regional di Asia Tenggara pada tahun 1976-1981. Dengan menggunakan pendekatan historis, penelitian ini menganalisis bagaimana ancaman narkoba mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama lintas batas. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam upaya memberantas perdagangan narkoba, serta dampaknya bagi keamanan regional. Perlawanan terhadap narkoba juga turut ditingkatkan, puncaknya pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon mendeklarasikan “War on Drugs” atau perang total terhadap narkoba dan menyatakan narkoba sebagai “musuh masyarakat nomor satu”. Deklarasi yang dipicu oleh meningkatnya perdagangan narkoba, terutama heroin di Amerika Serikat. Hal ini juga memicu gerakan serupa di Asia Tenggara karena salah satu wilayah distributor narkoba berada di sebuah kawasan yang dikenal sebagai “the Golden Triangle” (Segitiga Emas). Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum menjadi aktor penting dalam mengatasi perdagangan gelap narkoba di Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam pembentukan kerjasama regional antar kepolisian di Asia Tenggara dipengaruhi oleh dinamika kejahatan transnasional perdagangan gelap narkoba. Gerakan yang dipicu oleh deklarasi perang terhadap narkoba di Amerika Serikat yang kemudian menciptakan berbagai skema kerjasama internasional di lingkup regional Asia Tenggara, hingga pembentukan Perhimpunan Kepolisian Asia Tenggara (ASEANAPOL) pada tahun 1981. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

**Kata kunci:** kepolisian, kerjasama, kejahatan transnasional, perdangan gelap narkoba, Asia Tenggara.

### ABSTRACT

*This study examines the dynamics of illicit drug trafficking and its impact on the formation of regional police cooperation in Southeast Asia in 1976-1981. Using a historical approach, this study analyzes how the drug threat encourages ASEAN countries to increase cross-border cooperation. The study also identifies the factors that influence the success and challenges of efforts to eradicate drug trafficking, as well as their impact on regional security. The fight against drugs has also increased, culminating in 1971, when the President of the United States, Richard Nixon declared a "War on Drugs" and declared drugs "the number one enemy of society". The declaration was triggered by the increasing drug trade, especially heroin in the United States. This has also triggered a similar movement in Southeast Asia because one of the drug distributors' territory is in an area known as "the Golden Triangle". The police as a law enforcement agency is an important actor in overcoming illicit drug trafficking in Southeast Asia. The results of the study show that the formation of regional cooperation between police forces in Southeast Asia is influenced by the dynamics of transnational crime of illicit drug trafficking. The movement was triggered by the declaration of war on drugs in the United States which then created various international cooperation schemes in the Southeast Asian region, until the establishment of the Southeast Asian Police Association (ASEANAPOL) in 1981. The methods used in this study*

*are historical methods, namely heuristic, source criticism, interpretation and historiography.*

**Keywords:** *police, cooperation, transnational crime, illicit drug trafficking, Southeast Asia.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 1976, The Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membentuk ASEAN Drugs Expert (ADE) Meeting pada 1976 yang merupakan tindak lanjut dari Konvensi Tunggul Narkotika tahun 1961 sebagai bentuk upaya memerangi segala bentuk aktivitas narkoba, hingga pada tahun 1981, dibentuk kerjasama antar kepolisian regional Asia Tenggara dengan nama ASEAN Nation Police (ASEANAPOL) dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN, terutama perdagangan gelap narkoba. Kerjasama regional antar kepolisian negara dan terciptanya undang-undang ekstradisi untuk mengatasi kejahatan lintas negara atau transnasional bukanlah hal yang begitu saja terjadi (Oktavian et al., 2024). Terdapat dua faktor pendorong terbentuknya sebuah kerjasama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor dari luar yang meliputi ancaman bersama, peluang bersama, perubahan dan tekanan dari luar. Sedangkan faktor internal yaitu kepentingan bersama, keterbatasan sumber daya, ketergantungan bersama, nilai-nilai bersama dan identitas bersama (Yuliyanti et al., 2025).

Pada periode 1970an, bentuk baru kejahatan terorganisir mulai berkembang. Kombinasi iklim geopolitik baru, ekonomi dunia yang mengglobal dan perbatasan yang lebih longgar, serta revolusi dalam teknologi informasi yang tersedia mempercepat perubahan. Kelompok kejahatan berubah dari kelompok kejahatan domestik menjadi organisasi kriminal yang bersifat global dan transnasional. Berbagai kejahatan lintas batas yang berkembang di Asia Tenggara pada tahun 1970an, antara lain penyelundupan orang, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme dan penyelundupan barang-barang lainnya, termasuk penyelundupan narkotika atau narkoba.

Wilayah Asia Tenggara telah lama menjadi wilayah yang menguntungkan bagi para mafia Narkoba untuk mengembangkan bisnisnya karena kondisi geografisnya yang merupakan negara kepulauan yang luas, memungkinkan untuk digunakan sebagai jalur penyelundupan yang sulit untuk dideteksi. Wilayah yang terkenal paling produktif adalah pada kawasan yang dijuluki The Golden Triangle atau segitiga emas, meliputi wilayah perbatasan darat antara negara Laos, Thailand dan Myanmar yang memproduksi Opium dalam skala besar. Perdagangan opium di Asia Tenggara merupakan peninggalan kolonialisme Eropa yang menyebar melalui orang-orang Cina (McCoy, 2003). Berakhirnya perang Vietnam pada tahun 1975, ternyata melahirkan masalah baru. Kemunculan Generasi Bunga atau "Hippies", sebuah gerakan yang lahir dan menyebar masif di kalangan anak muda di Amerika sejak tahun 1960an sebagai bentuk protes dan depresi terhadap peperangan yang terjadi, terutama perang Vietnam. Pergerakan hippie global pada dekade 1970-an turut memicu peningkatan permintaan akan narkoba di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Awalnya, ganja, barbiturat, dan sedatif menjadi jenis narkoba yang paling populer. Namun, pada akhir dekade tersebut, pola konsumsi mulai bergeser dengan meningkatnya penggunaan morfin dan kemunculan heroin di pasar gelap Indonesia. Perluasan jaringan perdagangan narkoba secara ilegal semakin menguat, menghubungkan Indonesia dengan pasar-pasar gelap di kawasan ASEAN dan bahkan dunia (Badar et al., 2020).

Peningkatan dari aktivitas perdagangan narkoba di Asia Tenggara yang berpengaruh tidak hanya dalam lingkup regional, namun juga hingga lingkup internasional menjadi faktor pendorong semakin dibutuhkannya banyak unsur terkait dari berbagai tingkat, terutama penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang menjadi bagian penting untuk mendukung penanggulangan peredaran gelap narkoba dan memberantas sindikat-sidikatnya. Kepolisian di Asia Tenggara menghadapi berbagai kendala, mulai dari regulasi penegakkan hukum pada tiap negara yang berbeda hingga kapasitas dan kemampuan anggotanya yang disebabkan oleh belum dibentuknya kerjasama dalam lingkup regional. Puncaknya, untuk mengatasi permasalahan ini dan merespon kebutuhan ASEAN, lahir inisiatif kerjasama antar kepolisian ASEAN dengan nama ASEAN Association of Chiefs of Police (ASEANAPOL) pada tahun 1981. ASEANAPOL yang beranggotakan kepala kepolisian negara menjadi sarana dari ICPO-Interpol untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan di samping pertukaran informasi maupun pengalaman antar kepolisian ASEAN (Djamin et al., 2007).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana dinamika kejahatan transnasional perdagangan gelap narkoba di Asia Tenggara terhadap kerjasama kepolisian di Asia Tenggara selama kurun tahun 1976 hingga 1981. Oleh karena itu, untuk memberikan analisis yang lebih mendalam, maka penulis menguraikannya menjadi tiga pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

- 1) Apa faktor eksternal dan internal yang mendorong pembentukan kerjasama kepolisian regional Asia Tenggara?
- 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh ASEAN dan kepolisian pada masing-masing negara di Asia Tenggara dalam mengatasi kejahatan transnasional perdagangan gelap narkoba di Asia Tenggara?
- 3) Bagaimana proses pembentukan ASEANAPOL?

## **METODE**

Metode sejarah yang diperkenalkan oleh Kuntowijoyo digunakan dalam penelitian ini. Metode terdiri dari lima tahapan yang dimulai dengan pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan sumber), Interpretasi (analisis dan sintesis), dan Historiografi (penulisan sejarah). Tahap heuristik atau pengumpulan sumber yang dilakukan secara daring dan luring untuk memperoleh sumber primer dan sekunder (Kuntowijoyo, 2005).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Eksternal dan Internal yang Mendorong Pembentukan Kerjasama Kepolisian Regional Asia Tenggara**

Sistem pengendalian terhadap penggunaan narkoba di ranah internasional merupakan salah satu sistem multilateral berbasis konsensus tertua yang pernah ada. Sistem ini sudah ada sebelum adanya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Instrumen kerja sama internasional dalam pengaturan dan pengendalian obat-obatan narkotika dimulai pada awal abad ke-20 dengan dibentuknya Komisi Opium Internasional di Shanghai pada tahun 1909. Kemudian, Konvensi Narkoba Internasional yang pertama, Konvensi Opium Internasional di Den Haag, ditandatangani oleh Jerman, Amerika Serikat, Tiongkok, Perancis, Inggris, Italia, Jepang, Belanda, Persia, Portugal, Rusia dan Siam (Thailand) pada tahun 1912 dan mulai berlaku pada tahun 1915. Konvensi Opium Internasional di Den Haag, dirancang untuk membatasi pengiriman obat-obatan narkotika yang tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan medis, kemudian muncul sebagai instrumen yang benar-benar internasional (UNODC, 2008, hlm. 7). Pada

tahun 1919, hasil Konvensi Opium Internasional di Den Haag dimasukkan ke dalam Perjanjian Perdamaian Versailles pascaperang dunia pertama dan menjadi landasan dari serangkaian perjanjian internasional yang diperkenalkan selama sisa abad ini (Pascoe, 2017). Konvensi Tunggal Narkoba 1961 dibentuk. Konvensi ini menyatukan entitas-entitas terkait narkoba yang sudah ada sebelumnya dan berganti nama menjadi International Narcotics Control Board atau Badan Pengawasan Narkotika Internasional (INCB). Pada tingkat global, PBB telah berupaya membentuk rezim internasional melawan perdagangan gelap dan penyalahgunaan obat-obatan melalui beberapa konvensi. Konvensi Wina tahun 1971 tentang Zat Psikotropika (Anggraini, 2016).

Deklarasi War on Drugs atau perang terhadap narkoba yang digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat, Nixon pada 1971, akibat dari lonjakan angka peredaran heroin dan pecandunya. Deklarasi tersebut melahirkan efek domino pada negara-negara lain yang terdampak sama untuk membuat regulasi terhadap narkoba. Asia Tenggara adalah salah satu wilayah yang menjadi target operasi dari pemerintah Amerika Serikat sejak berakhirnya perang Vietnam (McCoy, 2003). Isu ini dibawa dalam General Assembly ICPO-Interpol tahun 1971 di Ottawa, Kanada. Delegasi Amerika Serikat di dalam sidang menyampaikan, bahwa perdagangan narkoba, terutama heroin dan kokain meningkat. Para penyelundup menyasiasi dengan membawa narkoba dalam jumlah kecil karena jumlah yang besar akan mudah untuk tertangkap. Selain itu, perdagangan ganja (*canabis*) antara Mexico dan Amerika Serikat yang juga menjadi masalah serius (General Assembly ICPO-Interpol, 1971: 266).

Keberhasilan Amerika Serikat terjadi pada tahun 1972 ketika kelangkaan heroin pertama kali muncul di Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. Pada awal tahun 1972, berbagai penyitaan heroin terjadi di Amerika Serikat, dengan total sekitar 200 kilogram. Beberapa laboratorium di Perancis disita dan rekor penyitaan 400 kilogram heroin yang ditujukan untuk pasar AS. Berbagai upaya penegakan hukum menghasilkan penyitaan di Amerika Latin dan ekstradisi seorang pengedar terkemuka. Pada pertengahan tahun 1972, terjadi kelangkaan heroin serius yang berlangsung setidaknya sampai tahun 1973, kelangkaan tersebut, selain menurunkan angka jumlah pecandu, justru berdampak lain pada kenaikan harga heroin, penurunan kemurnian heroin, pemalsuan resep, perampokan apotek dan pencarian pengganti heroin. Dua wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak akibat kelangkaan adalah New York dan Philadelphia dengan meningkatnya angka kematian (Reginald G. Smart, 1976, hlm. 60).

Produksi dan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara semakin berkembang sejak memasuki abad ke-19. Wilayah yang terkenal paling produktif adalah pada kawasan yang dijuluki The Golden Triangle atau segitiga emas, meliputi wilayah perbatasan darat antara negara Laos, Thailand dan Myanmar yang memproduksi Opium dalam skala besar. Kawasan Asia Tenggara, khususnya Thailand dijadikan rute utama perdagangan opium dari Myanmar melalui perbatasan Laos (Prayuda & Harto, 2020). Pada tahun 1960an, kombinasi beberapa faktor: intervensi militer Amerika, pemerintahan nasional yang korup, dan sindikat kriminal internasional, mendorong perdagangan opium di Asia Tenggara melampaui swasembada menjadi kemampuan ekspor. Produksi kelas rendah, heroin nomor 3 (kemurnian hanya 3-6 persen) telah dimulai pada tahun 1958 ketika pemerintah Thailand meluncurkan kampanye pemberantasan opium secara intensif yang memaksa sebagian besar pecandu opium beralih ke heroin (Boister et al., 2021).

Opium berubah bentuk yang lebih mudah untuk diselundupkan menjadi butiran-butiran kristal hingga serbuk, sehingga mudah untuk dicampurkan dengan produk ekspor lain, seperti teh, atau dalam

kemasan yang lebih sulit untuk diketahui oleh polisi. Opium yang memiliki bau yang khas menjadikan penggunaannya rentan ditangkap. Teknologi pembuatan heroin dibawa oleh sindikat Chiu Chau dari Hong Kong pada tahun 1969-1970. Mereka memperkenalkan teknik kompleks untuk menghasilkan produk bermutu tinggi, heroin nomor 4. Terdapat indikasi bahwa banyak laboratorium Segitiga Emas yang memproduksi heroin untuk American GIs (Tentara Amerika) di Vietnam dikelola oleh ahli kimia Chiu Chau. Di desa Nam Keung di sisi Sungai Mekong Laos, misalnya, komandan militer setempat, Mayor Chao La, melaporkan pada bulan September 1971 bahwa laboratorium heroin terdekat dipimpin oleh seorang ahli kimia Chiu Chau dari Hong Kong. Peningkatan signifikan dalam industri obat-obatan terlarang ini, kemudian memungkinkannya mengakses pasar AS.

Selain sindikat Chiu Chau, terdapat “war lord” atau panglima perang heroin utama di Burma selama bertahun-tahun, julukan yang disematkan kepada Zhang Shee Fu atau yang lebih dikenal sebagai Khun Sa. Ia merebut ladang opium dari Jenderal Li Mi dan Lo Sing Han. Selama tahun 1960-80an ia mengembangkan “kerajaan” opium-heroin yang semakin kuat berkat dukungan rahasia yang ia terima dari pemerintah Rangoon dan Central Intelligence Agency (CIA). Sumber legitimasi baru ditemukan dalam nasionalisme Shan. Pada tahun 1980-an, lebih dari 50 persen heroin yang diproduksi di negara tersebut disuling oleh Khun Sa (sisanya sebagian besar dihasilkan oleh saingan utama Khun Sa, Lo Hsiung-Han, yang juga mendapat dukungan dari Burma dan AS). Dia menggunakan keuntungan besar dari perdagangan narkoba untuk membiayai milisi pribadinya (15.000 Tentara Mong Tai atau MTA) serta “ibu kota” Shan yang berkembang pesat di Ho Mong (Chalk, 2000, hlm. 92). Ekspansi perdagangan terus menjalar ke wilayah selatan, yaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia, hingga ke benua Australia. Malaysia telah menjadi hub utama dalam jaringan peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara. Bermula pada sekitar awal abad ke-19, ketika Malaysia membuka negaranya untuk mengembangkan pertambangan timah, perkebunan karet dan lada. Pemerintah Inggris membawa sejumlah besar pekerja dari Cina dan India ke Malaysia. (Abdul Rani Bin Kamarudin, 2007, hlm. 4-6). Sedangkan Indonesia menjadi jalur transit narkoba internasional sejak akhir abad ke-17 yang dibawa oleh Belanda yang mendarat di pulau Jawa dan bersaing keras dengan pedagang Inggris untuk mengendalikan bisnis opium di Jawa. Opium mengalami kejayaan dan menjadi barang yang sangat diminati oleh orang Cina yang ada di Hindia Belanda dan orang bumiputera sendiri (Prayuda & Harto, 2020).

Berakhirnya perang Vietnam pada tahun 1975, ternyata melahirkan masalah baru. Kemunculan Generasi Bunga atau “Hippies”, sebuah gerakan yang lahir dan menyebar masif di kalangan anak muda di Amerika sejak tahun 1960an sebagai bentuk protes dan depresi terhadap peperangan yang terjadi, terutama perang Vietnam (Narahara dkk., 2024, hlm. 342). Budaya Hippies identik dengan perdamaian, cinta dan kebebasan yang diekspresikan dalam musik, gaya berpakaian dan gaya hidup yang beberapa diantaranya disalah artikan, kemudian mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Hippies dengan cepat menyebar ke berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara, berimplikasi terhadap permintaan terhadap narkoba yang ikut meningkat. Pada periode ini juga yang menjadi awal berkembangnya perdagangan gelap narkoba di Indonesia. Selama kurun tahun 1976 hingga 1979, jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, dan jenis sedativa atau hipnotika, sedangkan pemakaian morfin menurun. Tahun 1979-1985 Jenis yang banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, jenis hipnotika lainnya, dan minuman keras (alkohol). Pemakaian morfin mulai meningkat dan heroin (putaw) mulai

masuk ke pasaran gelap narkoba di Indonesia. Perdagangan ilegal terus menyebar luas dalam lingkup wilayah ASEAN hingga internasional.

### **Upaya Negara-Negara di ASEAN dalam Mengatasi Perdagangan Gelap Narkoba**

Di Asia Tenggara, upaya serupa dimulai oleh The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk mewujudkan apa yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok Tahun 1967 yang menjadi dasar tujuan didirikannya organisasi regional ini (Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, 2012, hlm. 2). Isi dari Deklarasi Bangkok, sebagai berikut:

- a) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
- b) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;
- c) Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
- d) Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada;
- e) Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Langkah-langkah kerjasama regional turunan telah diadakan dalam rangka mewujudkan ASEAN yang aman dari kejahatan transnasional perdagangan gelap narkoba. ASEAN mengawalinya dengan menghangatkan hubungan antar negara dalam bentuk Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) tahun 1976. Pada tahun yang sama, kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan perdagangan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara oleh ASEAN dimulai dengan membentuk ASEAN Drugs Expert (ADE) Meeting pada 1976 yang merupakan tindak lanjut dari Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 yang mulai dibelakukan pada tahun 1964. Konvensi tersebut menciptakan sebuah "streamlined control machinery" atau sebuah mesin kendali untuk membatasi produksi obat-obatan dan bahan kimia lainnya dengan meregulasi "jumlah yang dibutuhkan untuk tujuan medis dan ilmiah" (McCoy, 2003, hlm. 18).

Dalam sebuah langkah besar untuk saling membantu dalam menangani masalah narkotika, para pejabat tinggi pemberantasan narkotika dari lima negara ASEAN baru-baru ini sepakat untuk membentuk "badan penghubung" di kantor konsuler masing-masing untuk tujuan koordinasi yang lebih baik dalam tugas-tugas bersama. Konsensus ini dicapai dalam sebuah konferensi pejabat penegak hukum narkotika dari negara-negara ASEAN yang diadakan di Jakarta pada tanggal 4 hingga 20 November, sumber-sumber resmi mengatakan kemarin, "Badan penghubung" ini akan menjalankan peran penting dalam mengawasi dan memeriksa catatan kriminal serta perilaku para tersangka, kata sumber-sumber tersebut. Badan-badan tersebut akan memberikan informasi intelijen tentang lingkaran narkotika satu sama lain untuk kerja sama yang lebih baik. Prosedur ini akan memfasilitasi para pejuang narkotika di setiap negara anggota dengan fleksibilitas untuk menangani dengan cepat para pedangar narkotika internasional, kata sumber-sumber tersebut. Sementara itu, para peserta juga melaporkan catatan resmi masing-masing tentang pecandu narkoba di negara mereka pada pertemuan tersebut. Thailand menduduki peringkat teratas dengan lebih dari 603.000 pecandu narkoba, sementara Indonesia, Filipina, dan Malaysia memiliki sekitar 100.000 pecandu narkoba di masing-masing negara, kata sumber-sumber tersebut. Singapura berada di urutan terakhir dalam daftar dengan 30.000 pecandu. Di antara kelima negara tersebut, sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa Malaysia terlihat

paling rentan dalam menghadapi tingkat pecandu yang lebih tinggi daripada yang lain (Bangkok Post, 1978: 2).

Thailand adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memerangi perdagangan gelap Opium. Sebagaimana wilayahnya masuk ke dalam area segitiga emas dan menjadi salah satu pintu utama perdagangan menuju wilayah Selatan (Malaysia, Singapura dan Indonesia). Dewan narkotika pemerintah Thailand sedang mempersiapkan rencana substitusi tanaman yang diintensifkan untuk dipertimbangkan oleh kabinet yang membayangkan pengurangan 50 persen penanaman opium pada tahun 1979 dan 90 persen pada tahun 1981. Meskipun pencapaian tujuan ambisius tersebut masih dipertanyakan, rencana tersebut setidaknya merupakan ukuran kesungguhan pemerintah Thailand. Fokus awal dari rencana tersebut, yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Oktober, adalah sebuah distrik di Thailand utara yang menyumbang sekitar setengah dari produksi opium tahunan negara tersebut yang mencapai 50 ton. Untuk memfasilitasi akses ke pasar untuk tanaman alternatif, kendala utama hingga saat ini dalam upaya substitusi tanaman, dua belas pusat pengumpulan akan dibangun, semuanya terhubung dengan jalan kerikil yang terhubung dengan jaringan jalan nasional yang ada. Sebanyak 200 hingga 300 desa di daerah pegunungan terpencil yang tercakup dalam proyek percontohan ini akan dihubungkan ke dua belas pusat pengumpulan melalui jalan setapak yang dapat dilalui oleh hewan ternak. Para pejabat Thailand tampaknya mulai menyadari bahwa substitusi tanaman adalah satu-satunya cara yang efektif untuk mengurangi produksi opium. Sebuah program percobaan telah dilakukan di Thailand utara sejak tahun 1973, dan setidaknya ada selusin tanaman yang tampaknya menjanjikan pendapatan tahunan keluarga yang lebih tinggi daripada yang diperoleh dari produksi opium saat ini. Salah satu tanaman yang sedang dipertimbangkan adalah kopi yang memiliki pasar di Thailand yang jauh lebih besar daripada produksi (CIA World Drugs Report, 1977).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menangkap 231 pengedar dan pengguna narkotika selama operasi "Badai II/Harum Seri." Termasuk di dalamnya enam orang asing, dan tujuh jenis obat terlarang juga disita. Saat dimintai keterangan pada hari Selasa, Kolonel Polisi Dr. Darmawan Soedarsono, Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Polda Sumut, menjelaskan bahwa operasi "Badai II/Harum Manis" bertujuan untuk memerangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang serta tindak pidana yang diakibatkannya. Operasi ini dilaksanakan di Aceh, Sumut, Riau, Sumatera Selatan, Jabodetabek, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, dan Nusa Tenggara. Operasi yang dimulai pada tanggal 7 September 1978 ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu penyelidikan, penindakan, dan interogasi. Pada tahap penyelidikan, yang dimulai oleh unit-unit operasi, 300 orang menjadi target, namun 4 orang di antaranya telah meninggal dunia. Keempat orang yang meninggal tersebut adalah Chong PB (Jakarta); Ong BH (Tanjung Asahan, Sumut); Ny. Syam (Prapat, Simalungun, Sumut); dan Liem KH (Semarang). Keenam WNA yang ditangkap adalah Tjan SM alias Lie M (WN China); Deborah AL (WN Australia); Anthony VM (WN Selandia Baru); Frederic L (WN Perancis); dan Jeffrey AR (WN Australia). Polda Metro Jaya yang menggelar operasi "Madai II/Harum Manis" dengan melibatkan jajaran Polda Metro Jaya menangkap delapan orang yang diduga menjual atau menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang.

### **Proses Pembentukan ASEANAPOL**

Perdagangan gelap narkoba telah menjadi salah satu kejahatan transnasional yang telah lama ada dan menjadi musuh negara, terutama bagi kepolisian negara. Kepolisian memiliki peran sebagai law enforcer atau penegak hukum untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Internasional Crimes

Police Organization (ICPO-Interpol) atau Organisasi Kepolisian Internasional telah secara aktif menangani kejahatan ini sejak tahun 1926, dengan diadopsinya sebuah resolusi pada general assembly (sidang umum) yang merekomendasikan sejumlah tindakan untuk dipertimbangkan oleh negara-negara anggota. Sejak saat itu, isu mengenai aktivitas obat-obatan terlarang menjadi agenda hampir setiap tahun di sidang umum. Dibentuklah bagian yang berfokus menghadapi masalah narkoba di dalam struktur Interpol, yaitu Divisi II Kepolisian yang di dalamnya terdapat sub divisi lalu lintas narkoba. Sub divisi ini terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian operasi, bagian intelijen dan proyek khusus (Michael Fooner, 1990, hlm. 104–106). ICPO-Interpol inilah yang nantinya menjadi jembatan penghubung lahirnya kerjasama antar kepolisian negara.

International Crimes Police Organization atau Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional yang selanjutnya disebut ICPO-Interpol, telah menjadi pilar penting dalam memfasilitasi kerjasama kepolisian internasional memerangi kejahatan transnasional, termasuk di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Kerjasama kepolisian internasional di kawasan Asia telah dimulai sejak tahun 1967, 20 negara dari kawasan regional Asia telah menjadi anggota Interpol dan mengadakan Interpol Asian Regional Conference atau Konferensi Interpol Regional Asia pertama di Kyoto, Jepang. Negara-negara di Asia Tenggara yang paling awal bergabung dengan organisasi ICPO-Interpol adalah Thailand dan Indonesia. Thailand bergabung sejak tahun 1951, kemudian Indonesia bergabung ke dalam ICPO-Interpol sejak Mei 1952, satu bulan berikutnya Philipina bergabung pada 12 Juni 1952, dua tahun kemudian pada 1 Januari 1954 Myanmar juga ikut bergabung. Malaysia bergabung dalam ICPO-Interpol pada 4 September 1961, diikuti Singapura pada 1 Oktober 1968 (Membership of INTERPOL, t.t.).

Kepolisian di Asia Tenggara yang telah bergabung sebagai anggota ICPO-Interpol di Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya memberantas kejahatan transnasional perdagangan gelap narkoba di negaranya masing-masing melalui berbagai rangkaian operasi khusus dan mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh ASEAN yang mulai aktif untuk memberantas kejahatan ini.

General Assembly atau Majelis Umum ICPO-Interpol untuk pertama kalinya diadakan di Asia Tenggara. Philipina terpilih menjadi negara selanjutnya sebagai Lokasi diselenggarakannya majelis umum setelah Bugarin terpilih menjadi wakil presiden ICPO-Interpol pada Majelis Umum ke-48 di Nairobi, Kenya. Pada Majelis Umum Interpol ke-49 tahun 1980 di Manila, Kepala Kepolisian Indonesia saat itu, Awaloedin Djamin bersama dengan kepala kepolisian ASEAN, yaitu Fidel Ramos dari Filipina, Goh Yong Hong dari Singapura, Tan Sri Haniff bin Omar dari Malaysia dan Jenderal Polisi Suraphon dari Thailand, membicarakan perlunya kerja sama antara kepolisian negara-negara ASEAN. Akhirnya, pada Oktober 1981, para perwakilan dari negara ASEAN melakukan pertemuan dalam rangka menyetujui dibentuknya ASEAN Association of Chiefs of Police (ASEANAPOL) yang beranggotakan atas kepala lembaga kepolisian nasional dari masing-masing negara anggota ASEAN. ASEANAPOL menjadi sarana dari International Criminal Police Officer-International Police (ICPO-Interpol) untuk menjaga keamanan dan penegakkan hukum di kawasan Asia Tenggara (Djamin et al., 2007). ASEANAPOL menyelenggarakan pertemuan tahunan ini disebut Konferensi ASEANAPOL.

Persyaratan dasar bagi suatu negara untuk menjadi anggota ASEANAPOL adalah negara tersebut harus terlebih dahulu menjadi anggota ASEAN dan permohonan tersebut diajukan pada konferensi untuk mendapatkan persetujuan. Anggota ASEANAPOL pada awalnya adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Pada tahun 1984, Kepolisian Kerajaan Brunei bergabung dengan konferensi ini untuk pertama kalinya. Pada tahun 1996, Kepolisian Nasional Republik Vietnam

bergabung dengan konferensi. Pada tahun 1998, Departemen Kepolisian Umum Laos dan Kepolisian Myanmar bergabung dengan konferensi. Pada tahun 2000, Kepolisian Nasional Kamboja bergabung dengan konferensi. Anggota ASEANAPOL saat ini berjumlah 10 negara, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

## **SIMPULAN**

Sejak lama, kepolisian di kawasan Asia Tenggara telah menyadari bahwa kejahatan narkoba merupakan ancaman transnasional yang membutuhkan penanganan bersama, terutama setelah terjadinya peningkatan produksi opium yang dilakukan oleh sindikat Hong Kong sejak berakhirnya perang dunia ke-II menimbulkan reaksi. Berbagai inisiatif dan kebijakan telah dilakukan untuk membongkar dan memberantas jaringan-jaringan narkoba lintas negara.

Deklarasi War on Drugs oleh Presiden Nixon pada 1971, untuk mengatasi lonjakan peredaran heroin, menginspirasi negara lain untuk menetapkan regulasi narkoba, terutama di Asia Tenggara. Pada 1972, Amerika Serikat mengalami kelangkaan heroin, menaikkan harga dan menurunkan kemurniannya. Sementara itu, produksi opium di segitiga emas Asia Tenggara meningkat, didorong intervensi militer dan sindikat kriminal.

Opium diubah menjadi bentuk kristal dan serbuk untuk penyelundupan yang lebih mudah, sering dicampurkan dengan produk ekspor. Sindikat Chiu Chau dari Hong Kong membawa teknologi pembuatan heroin pada akhir 1960-an, menghasilkan heroin berkualitas tinggi. Khun Sa di Burma juga membangun kekuatan heroin, didukung oleh pemerintah dan CIA, menguasai lebih dari 50% produksi heroin di negara itu pada 1980-an.

Peningkatan perdagangan narkoba di Asia Tenggara mempengaruhi kerjasama penegakan hukum, khususnya kepolisian, di tingkat regional dan internasional. Berbagai kendala dihadapi kepolisian, termasuk regulasi yang berbeda dan kurangnya kerjasama. Untuk mengatasi masalah ini, ASEANAPOL dibentuk pada 1981 sebagai inisiatif kerjasama antar kepolisian. Penelitian ini menganalisis faktor pendorong dan upaya penanggulangan kejahatan transnasional narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2016). Kebijakan Asean Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Berbahaya Di Asia Tenggara. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(3), 36–51.
- Badar, M. Z., Fil, S., UIN, F. U. D. P. I., & Agama, G. M. (2020). *Pemikiran Sejarah Kuntowijoyo Dalam Kajian Filsafat Sejarah*. Masters Thesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Boister, N., Gless, S., & Jeßberger, F. (2021). *Histories Of Transnational Criminal Law*. Oxford University Press.
- Djamin, A., Ratta, I. K., Gunawan, I. P., & Wulan, G. A. (2007). Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia. *Yayasan Brata Bhakti*.
- Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Mccooy, A. W. (2003). *The Politics Of Heroin: CIA Complicity In The Global Drug Trade, Afghanistan, Southeast Asia, Central America*. Lawrence Hill Chicago, IL.
- Oktavian, A., Utama, M. R. G., Wibisono, T. Y., Alifia, N. A., & Pertiwi, A. P. (2024). Pelatihan Simulasi Sidang AMMTC ASEAN Di SMA Nasional Bandung. *WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer*, 6(3), 53–59.
- Pascoe, D. (2017). *Drugs Law And Legal Practice In Southeast Asia: Indonesia, Singapore And Vietnam*. Heinonline.
- Prayuda, R., & Harto, S. (2020). *ASEAN Dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Dinamika, Tantangan Dan Hambatan)*. Ombak.
- Yuliyanti, L., Djemat, Y. O., & Panorama, A. D. (2025). Kerja Sama Indonesia Dan Thailand Dalam Mengatasi Kasus Narkotika Di Indonesia Tahun 2021-2023. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 2(1).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).